

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS EKSPOR DAN IMPOR GANJA DALAM
RANGKA KESEHATAN DAN ILMU PENGETAHUAN
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

NANDA FAJAR OETOMO PAMUJI

NIM. 2110112089

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing I : Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

Pembimbing II : Dayu Medina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg: 08/PK VI/IV/2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Nanda Fajar Oetomo Pamuji	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang / 02 Februari 2002 b. Nama Orang Tua : Pamuji, Sutyem c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. No.BP : 2110112089	f. Tanggal Lulus : 2025 f. Predikat Lulus : Dengan Pujian g. Lama Studi : 4 Tahun Bulan h. IPK : 3,76 i. Alamat : Wisma Bunda Permai Blok A3, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat	

ANALISIS YURIDIS EKSPOR DAN IMPOR GANJA GANJA DALAM RANGKA KESEHATAN DAN ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

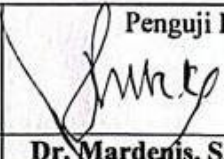
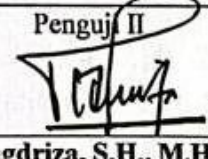
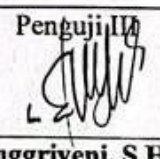
Nanda Fajar Oetomo Pamuji, 2110112089, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK-6), 167 halaman, Tahun 2025, Pembimbing: Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H. dan Dayu Medina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembahasan ganja dalam konteks kesehatan dan ilmiah kini beralih dari isu legalisasi domestik ke aspek perdagangan internasional. Regulasi ganja berbeda di setiap negara, namun *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* menjadi pondasi yang mengatur setiap negara. *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* memungkinkan produksi, perdagangan, ekspor, dan impor ganja secara ketat untuk tujuan medis dan ilmiah, asalkan diatur oleh otoritas berwenang di masing-masing negara. Di sisi lain, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika Golongan I, yang secara umum dilarang untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, undang-undang ini membuka kemungkinan penggunaan terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi BPOM. Rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan ekspor dan impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis menurut hukum internasional dan nasional Indonesia, (2) bagaimana implementasi ekspor impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ekspor dan impor ganja diatur dalam *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* menjadi acuan utama hukum internasional, bahwa ganja dapat diproduksi, diperdagangkan, dan didistribusikan untuk tujuan medis dan ilmiah sebagaimana diatur dalam *Article 2 paragraph 5* dan *Article 4*. Konvensi ini mengharuskan negara pihak untuk menyampaikan estimasi kebutuhan nasional setiap tahun (*Article 19*) dan menerapkan pembatasan kuota produksi serta distribusi (*Article 21*). Ketentuan ekspor dan impor ganja diatur dalam *Article 31*, yang mewajibkan adanya otorisasi ekspor dan sertifikasi impor oleh otoritas kompeten masing-masing negara. Dalam konteks nasional, Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I dalam Lampiran undang-undang tersebut, yang secara umum dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan/teknologi pada Pasal 8 ayat 1. Namun, Pasal 8 ayat 2 membuka kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan/teknologi dengan syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi BPOM. Ketidak harmonisan antara norma internasional dan regulasi nasional menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan ekspor impor ganja untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan peninjauan regulasi secara akuntabel dan terukur.

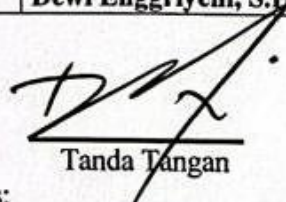
Kata Kunci : Ganja, Ekspor, Impor, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penguji,

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr. Mardenis, S.H., M.Si	Magdriza, S.H., M.H.	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No.University Alumni	Student Name: Nanda Fajar Oetomo Pamuji	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang / February 2nd, 2002 b. Parents Name : Pamuji, Sutyem c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. No.BP : 2110112089	f. Graduation Date : December g. Predicate : Cumlaude h. Study Time : 4 Years Month i. GPA : 3, 76 j. Address : Wisma Bunda Permai Blok A3, Koto Tengah, West Sumatra.	

JURIDICAL ANALYSIS OF CANNABIS EXPORT AND IMPORT FOR HEALTH AND SCIENCE PURPOSES UNDER INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW

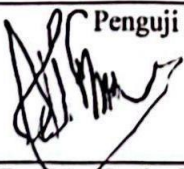
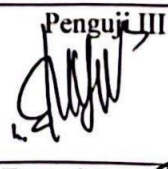
Nanda Fajar Oetomo Pamuji, 2110112089, Faculty of Law, Andalas University, International Law Concentration Program (CP-6), 167 pages, Year 2025, Supervisor: Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H. and Dayu Medina, S.H., M.H.

ABSTRACT

The discourse on cannabis in the context of health and science has shifted from the issue of domestic legalization to the dimension of international trade. Although regulations differ across jurisdictions, the *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* serves as the principal framework governing all States. The Convention permits the production, trade, export, and import of cannabis under strict supervision exclusively for medical and scientific purposes, provided that such activities are authorized by competent national authorities. In contrast, Indonesia, through Law No. 35 of 2009 on Narcotics, classifies cannabis as a Schedule I narcotic, thereby prohibiting its use in health services and scientific endeavors. Nevertheless, the law provides a limited exception for scientific and technological purposes, subject to the approval of the Minister of Health and recommendation from the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). This research addresses two main problems: (1) how the regulation of cannabis export and import for health and medical knowledge is governed under international law and Indonesian national law, and (2) how the implementation of such regulation is carried out in Indonesia. Employing an empirical research method with a descriptive approach, data were obtained through interviews with the West Sumatra Provincial National Narcotics Agency (BNNP), the Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM RI), and the Nusantara Cannabis Circle (LGN). The findings demonstrate that the regulation of cannabis export and import is primarily anchored in the *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, particularly Article 2(5), Article 4, Article 19, Article 21, and Article 31, which collectively require States to submit annual estimates of national demand, restrict production and distribution quotas, and ensure export authorization and import certification by competent authorities. At the national level, Indonesia refers to Law No. 35 of 2009, which generally prohibits cannabis use under Article 8(1), yet provides a conditional allowance under Article 8(2) for medical and scientific purposes with ministerial approval. The divergence between international obligations and national regulations creates challenges in harmonizing policies, underscoring the need for a more accountable and evidence-based regulatory review to enable Indonesia to navigate its international commitments while safeguarding national health and legal interests.

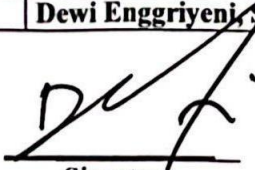
Keywords: Cannabis, Export, Import, Health, Scientific Research, Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Law Number 35 of 2009 on Narcotics.

Examiner,

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr. Mardenis, S.H., M.Si	Magdariza, S.H., M.H.	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of International Law Departement: Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University	
No. Faculty Alumni:	Name:	Signature:
No. University Alumni:	Name:	Signature: